

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*) antara Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Non Pengendali

Pada saat manajer-pemilik adalah pemegang saham tunggal, maka masalah keagenan tidak ada dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Namun, apabila kepemilikan tersebar yaitu kepemilikan berada di tangan pemegang saham dan kontrol di tangan manajemen, maka masalah keagenan yang kemungkinan muncul adalah antara pemegang saham dan manajemen. Hal tersebut dikarenakan pada saat kepemilikan saham perusahaan publik diasumsikan tersebar, terdapat pemisahan antara kontrol dan kepemilikan. Berdasarkan asumsi ini, kontrol terpusat pada manajemen karena tidak seorangpun pemegang saham secara individual dapat secara signifikan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam beberapa dasawarsa belakangan, literatur keuangan didasarkan pada asumsi bahwa kepemilikan saham perusahaan publik tersebar di tangan masyarakat. Bahkan literatur keuangan modern, seperti Jensen dan Meckling (1976) didasarkan pada asumsi tersebut.

Namun apabila kepemilikan saham ternyata terkonsentrasi, maka masalah keagenan pokok bukan lagi antara manajemen dan pemegang saham, melainkan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali (La Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000a; serta Faccio dan Lang, 2002). Masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non

pengendali muncul dengan adanya pemisahan hak aliran kas dengan hak kontrol. Mekanisme pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol yang dapat memunculkan masalah keagenan adalah kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan. Dari dua mekanisme tersebut, kepemilikan piramida adalah mekanisme yang paling umum menyebabkan masalah keagenan (La Porta et al., 1999).

Gilson dan Gordon (2003) mengemukakan bahwa masalah keagenan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu masalah keagenan pertama antara pemegang saham dan manajemen serta masalah keagenan kedua antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Masalah keagenan antara pemegang saham dan manajemen muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol, sedangkan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali muncul karena adanya insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol. Manfaat privat inilah yang mendorong pemegang saham pengendali untuk mempertahankan kontrol perusahaan. Manfaat privat atas kontrol lebih besar apabila kepemilikannya terkonsentrasi.

Secara empiris terbukti bahwa konsentrasi kepemilikan terjadi di banyak negara seperti yang ditemukan oleh La Porta et al. (1999), Claessens et al. (2000a), serta Faccio dan Lang (2002). Pemegang saham pengendali memiliki kontrol terhadap perusahaan melebihi hak aliran kasnya. Dengan konsentrasi kepemilikan seperti ini, muncul konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali mampu secara efektif mempengaruhi kebijakan manajemen atau

bahkan menentukan manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada permasalahan pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. Hak kontrol merupakan hak suara untuk mengambil keputusan penting. Hak aliran kas merupakan klaim terhadap dividen. *Cash flow right leverage* (selisih antara perbedaan hak kontrol dan hak aliran kas) sering dijadikan alat ukur untuk mengetahui kemampuan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol yang dimilikinya. Tingginya *cash flow right leverage* menunjukkan tingginya insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham non pengendali. Namun, apabila hak aliran kas juga tinggi, maka hak aliran kas ini dapat mengurangi keinginan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi.

Masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali meningkat apabila pemegang saham pengendali juga terlibat dalam manajemen. Walaupun tidak terkait dengan kepemilikan saham, keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen dapat meningkatkan kontrol pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting. Dengan keterlibatan dalam manajemen, pemegang saham pengendali bukan lagi sekadar dapat memonitor manajemen melainkan sudah menjadi bagian dari manajemen itu sendiri. La porta *et al.* (1999) menyatakan bahwa selain memiliki hak kontrol lebih besar dari hak aliran kas, pemegang saham pengendali juga meningkatkan kontrol pada perusahaan melalui keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen perusahaan. Hal tersebut berpotensi memunculkan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali.

Masalah yang muncul biasanya berupa ekspropriasi yaitu proses penggunaan hak kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Menurut Claessens *et al* (2000a), sebanyak 57% perusahaan publik di Asia memiliki manajemen yang juga merupakan bagian dari pemegang saham pengendali. Keterlibatan pemegang saham pengendali pada manajemen perusahaan publik paling tinggi terdapat di Malaysia dan Indonesia masing-masing 85%. Masalah keagenan antar pemegang saham juga semakin besar apabila dalam sebuah perusahaan terdapat pemegang saham pengendali tunggal. Hal ini terjadi karena tidak ada pemegang saham lain yang dapat mengendalikan insentif dan keinginan pemegang saham terbesar untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan sesuai dengan kepentingannya. Dengan hak kontrol tertentu, kendali pemegang saham pengendali dalam sebuah perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali kedua akan semakin kuat. Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini menggunakan teori keagenan kedua sebagai dasar utama dalam menjelaskan fenomena struktur kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia.

2.2 Pemegang Saham dan Hak Pemegang Saham

2.2.1. Pemegang Saham Biasa

Klasifikasi pemegang saham biasa secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Pemegang Saham Pengendali

Pemegang saham pengendali adalah individu, keluarga, atau institusi yang memiliki kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan publik pada tingkat pisah batas hak kontrol tertentu. La Porta *et al.* (1999), Claessens *et al.* (2000a), serta Faccio dan Lang (2002) mengklasifikasi pemegang saham pengendali menjadi lima, yaitu :

a) Keluarga

Sebuah perusahaan publik dikategorikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga apabila pemegang saham pengendali terbesar perusahaan tersebut adalah individu pada tingkat hak kontrol tertentu. La Porta *et al.* (1999), Claessens *et al.* (2000a), serta Faccio dan Lang (2002) mengidentifikasi keluarga berdasarkan kesamaan nama belakang dan ada tidaknya hubungan perkawinan. Anggota keluarga dikategorikan sebagai satu kesatuan pemegang saham pengendali dengan asumsi bahwa mereka memberikan hak suara sebagai koalisi (Wiwattanakantang, 2000).

b) Pemerintah

Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah apabila pemegang saham pengendali terbesar dalam perusahaan tersebut adalah pemerintah pada tingkat hak kontrol tertentu. Pemerintah dikelompokkan sebagai pemegang saham pengendali karena tujuan pemerintah mengendalikan perusahaan relatif berbeda dari tujuan pemegang saham pengendali lainnya. Tujuan pokok pemerintah

mengendalikan sebuah perusahaan adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah mengendalikan perusahaan untuk tujuan politik (Shleifer dan Vishny, 1994).

c) Institusi Keuangan dengan Kepemilikan Luas

Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh institusi keuangan publik apabila pemegang saham pengendali terbesar dalam perusahaan tersebut adalah institusi keuangan publik yang dimiliki secara luas oleh masyarakat pada tingkat hak kontrol tertentu. La Porta *et al.* (1999) membuat klasifikasi tersendiri bernama institusi keuangan dengan kepemilikan luas karena perusahaan di mana institusi keuangan menjadi pemegang saham pengendali kurang tepat diklasifikasi sebagai perusahaan dengan kepemilikan luas. Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa perusahaan publik tersebut dikendalikan oleh institusi keuangan yang juga perusahaan publik, walaupun institusi keuangan tersebut dimiliki secara luas oleh masyarakat. Apabila pemegang saham sebuah perusahaan publik adalah institusi keuangan yang juga perusahaan publik, maka ada dua kemungkinan klasifikasi pemegang saham pengendali. Pertama, setelah kepemilikan terhadap institusi keuangan sebagai pemegang saham perusahaan publik tersebut ditelusuri, bisa jadi ada pemilik ultimat pada pisah batas tertentu. Apabila hal ini yang terjadi, maka institusi keuangan tersebut bukanlah pemegang saham pengendali yang masuk dalam kategori ini. Kedua, setelah kepemilikan terhadap institusi keuangan sebagai pemegang saham perusahaan publik

tersebut ditelusuri, bisa jadi tidak ada pemilik ultimat pada pisah batas hak kontrol tertentu. Institusi keuangan seperti inilah yang termasuk pemegang saham pengendali dalam klasifikasi ini, yaitu institusi keuangan dengan kepemilikan luas.

d) Perusahaan dengan Kepemilikan Luas

Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik lainnya apabila pemegang saham pengendali terbesar dalam perusahaan tersebut adalah perusahaan publik yang dimiliki secara luas oleh masyarakat pada tingkat hak kontrol tertentu. Klasifikasi pemegang saham pengendali ini dibuat karena terdapat argumen bahwa perusahaan di mana perusahaan lain menjadi pemegang saham pengendali kurang tepat diklasifikasi sebagai perusahaan dengan kepemilikan luas karena kenyataannya perusahaan publik tersebut dikendalikan oleh perusahaan publik lain yang kepemilikannya secara luas oleh masyarakat. Perusahaan dapat dimasukkan dalam klasifikasi ini hanya apabila kepemilikan perusahaan pemegang saham pengendali adalah secara luas oleh masyarakat.

e) Pemegang Saham Pengendali Lainnya

Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali lainnya apabila pemegang saham pengendali terbesar dalam perusahaan tersebut adalah investor asing, koperasi, dan karyawan pada tingkat hak kontrol tertentu.

2) Pemegang Saham Non Pengendali

Pemegang saham non pengendali yaitu mereka yang telah membeli saham di bursa dan tidak terlibat dalam manajemen

2.2.2. Hak Pemegang Saham Biasa

Klasifikasi hak pemegang saham biasa secara umum terbagi atas tiga, yaitu :

1) Hak *Preemptive*

Hak *Preemptive* merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Hak ini memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentasenya tidak berubah. (Hartono, 2009).

2) Hak Kontrol

Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan (La Porta *et al.*, 1999). Hak kontrol terdiri atas dua yaitu :

a) Hak Kontrol Langsung

Hak kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas nama dirinya pada sebuah perusahaan.

b) Hak Kontrol Tidak Langsung

Hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang

memimpin perusahaannya. Pemegang saham melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan dewan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham (Hartono, 2009).

3) Hak Menerima Pembagian Keuntungan (Hak Aliran Kas)

Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan (La Porta *et al.*, 1999). Hak aliran kas terdiri atas dua yaitu :

a) Hak Aliran Kas Langsung

Hak aliran kas langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali pada perusahaan publik atas nama dirinya sendiri.

b) Hak Aliran Kas Tidak Langsung

Hak aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian persentase saham dalam setiap rantai kepemilikan. Hak aliran kas tidak langsung menunjukkan klaim pemegang saham pengendali terhadap dividen secara tidak langsung melalui mekanisme kontrol terhadap perusahaan.

Cash Flow Right Leverage merupakan deviasi hak aliran kas dari hak kontrol. Semakin besar deviasi hak aliran kas dan hak kontrol menunjukkan semakin tinggi peningkatan kontrol pemegang saham pengendali melebihi hak aliran kasnya. Peningkatan kontrol tersebut diperoleh melalui beberapa mekanisme yang lazim dilakukan seperti kepemilikan piramida.

2.3 Struktur Kepemilikan

2.3.1. Konsep Kepemilikan Imediat

Kepemilikan imediat adalah kepemilikan langsung dalam perusahaan publik. Berdasarkan konsep kepemilikan ini, rangkaian kepemilikan tidak ditelusuri dan besarnya kepemilikan seorang pemegang saham ditentukan berdasarkan persentase saham yang tertulis atas nama dirinya. Kelemahan konsep kepemilikan imediat (Siregar, 2007) :

- 1) Konsep kepemilikan imediat tidak mengkaji kemungkinan adanya rantai kepemilikan pada perusahaan publik.
- 2) Konsep kepemilikan imediat tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik ultimat.
- 3) Konsep kepemilikan imediat tidak dapat digunakan untuk mengkaji ada tidaknya pemisahan kepemilikan dan kontrol oleh pemegang saham.
- 4) Konsep kepemilikan imediat tidak bisa mengidentifikasi mekanisme peningkatan kontrol pemegang saham terhadap sebuah perusahaan publik.

2.3.2. Konsep Kepemilikan Ultimat

Kepemilikan ultimat adalah kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan publik. Kepemilikan langsung menggambarkan persentase saham yang dimiliki pemegang saham atas nama dirinya sendiri. Kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan terhadap sebuah perusahaan publik melalui rantai kepemilikan.

Berdasarkan konsep kepemilikan ini, rangkaian kepemilikan harus ditelusuri sampai dengan pemilik ultimat dapat diidentifikasi. Dengan konsep

kepemilikan ultimat, kepemilikan perusahaan publik diklasifikasi menjadi dua yaitu kepemilikan luas dan kepemilikan ultimat. Masuk tidaknya sebuah perusahaan dalam kategori kepemilikan luas atau kepemilikan ultimat tergantung pada pisah batas hak kontrol yang digunakan peneliti.

2.4 Mekanisme Pemisahan Hak Kontrol dan Hak Aliran Kas

2.4.1. Struktur Kepemilikan Piramida

Kepemilikan piramida adalah kepemilikan secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain, baik melalui perusahaan publik maupun perusahaan nonpublik (Claessens *et al.*, 2000a; Claessens *et al.*, 2000b). La Porta *et al.* (1999) melaporkan bahwa mekanisme peningkatan hak kontrol yang paling lazim di negara berkembang adalah struktur kepemilikan piramida. Ada dua hal yang harus dipenuhi agar kepemilikan dapat dikategorikan sebagai kepemilikan piramida yaitu :

- 1) Terdapat pemegang saham pengendali atau pemilik ultimat pada pisah batas hak kontrol yang ditentukan.
- 2) Terdapat perusahaan lain yang dalam kepemilikan tersebut antara pemegang saham pengendali dengan perusahaan publik yang dikendalikan.

2.4.2. Lintas Kepemilikan

Lintas kepemilikan adalah kepemilikan pemegang saham pengendali terhadap dua atau lebih perusahaan yang saling memiliki satu dengan yang lainnya. Saat ini lintas kepemilikan sudah dilarang di Indonesia.

2.5 Manajemen Laba

2.5.1. Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (Schipper, 1989). Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba. Manajemen laba dapat berupa “kosmetik”, jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapat “murni”, jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba (Subramanyam dan Wild, 2009).

2.5.2. Teori Manajemen Laba

Tiga hipotesis *Positive Accounting Theory* yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman (1986) yaitu :

1) *The Bonus Plan Hypothesis*

The Bonus Plan Hypothesis merupakan teori manajemen laba yang mengemukakan bahwa manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang mendapatkan bonus besar berdasarkan *earnings*, lebih banyak menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan.

2) *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

The Debt to Equity Hypothesis merupakan teori manajemen laba yang mengemukakan bahwa manajer yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih kebijakan akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

3) *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)*

The Political Cost Hypothesis merupakan teori manajemen laba yang mengemukakan bahwa semakin besar perusahaan semakin besar pula keinginan perusahaan menurunkan laba dengan menggunakan kebijakan akuntansi tertentu. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak perusahaan dan lain-lain.

2.5.3. Motivasi Manajemen Laba

Subramanyam dan Wild (2009) menjelaskan motivasi melakukan manajemen laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah. Insentif utama untuk melakukan manajemen laba dibahas sebagai berikut :

1) Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian

bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum diubah berada di antara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Sebaliknya, saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan. Contoh lain insentif perjanjian adalah persyaratan utang yang biasanya berdasarkan rasio yang menggunakan angka akuntansi seperti laba. Oleh karena pelanggaran syarat utang menimbulkan biaya tinggi bagi manajer, maka mereka cenderung melakukan manajemen laba (biasanya menjadi lebih tinggi) untuk menghindari pelanggaran tersebut.

2) Dampak Harga Saham

Insentif manajemen laba lainnya adalah potensi dampak terhadap harga saham. Misalnya, manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti merger yang akan dilakukan, penawaran surat berharga, atau rencana untuk menjual saham.

3) Insentif Lain

Laba sering kali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan oleh badan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoli dan IRS. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau

proteksi dari persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakkan permintaan serikat buruh. Salah satu insentif manajemen laba lainnya adalah perubahan manajemen yang sering menyebabkan terjadinya *big bath*. Alasan terjadinya *big bath* adalah melemparkan kesalahan pada manajer yang berwenang sebagai tanda bahwa manajer baru harus membuat keputusan tegas untuk memperbaiki perusahaan, dan yang terpenting adalah memberikan kemungkinan dilakukannya peningkatan laba di masa depan.

2.5.4. Strategi Manajemen Laba

Menurut Subramanyam dan Wild (2009) terdapat tiga jenis strategi manajemen laba:

1) Income Maximization (Meningkatkan Laba)

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini, sehingga dapat meningkatkan laba. Kasus yang terjadi adalah perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan dapat melakukan manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Pembebanan satu saat ini sering kali dilaporkan di bawah laba bersih (*below the line*), sehingga dipandang tidak terlalu relevan.

2) *Big Bath*

Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi *big bath* juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya. Oleh karena sifat *big bath* yang tidak biasa dan tidak berulang, pemakai cenderung tidak memperhatikan dampak keuangannya. Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba masa depan.

3) *Income Smoothing (Meratakan Laba)*

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba ini.

2.5.5. Mekanisme Mekanisme Laba

Menurut Wild et al. (2007), mekanisme laba secara umum dapat berupa *real earnings management* atau berupa *cosmetic earnings management*.

1) *Real Earnings Management*

Real earnings management merupakan mekanisme manajemen laba dimana manajer melakukan suatu tindakan dengan konsekuensi kas untuk tujuan mengelola laba. *Real earnings management* lebih *troubling* dibandingkan *cosmetic earnings management* karena mencerminkan keputusan bisnis yang seringkali mengurangi *shareholder wealth*. *Real earnings management* dilakukan melalui manipulasi aktivitas riil, seperti menyediakan diskon untuk meningkatkan penjualan dan memotong *discretionary expenditure* seperti biaya riset dan pengembangan. Tindakan ini dapat meningkatkan pendapatan atau laba bersih, akan tetapi memiliki konsekuensi *real cost*. Namun, karena manipulasi aktivitas riil bukanlah pelanggaran terhadap Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU), maka metode manajemen laba ini diharapkan memiliki *lower cost of detection* dibandingkan metode manajemen akrual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manajer melakukan manipulasi aktivitas riil untuk memaksimalkan bonus berbasis laba dan memenuhi target laba tertentu (Bushee, 1998; Roychowdhury, 2006).

2) *Cosmetic Earnings Management*

Cosmetic earnings management dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

a) *Income Shifting* (Pemindahan Laba)

Income shifting merupakan proses manajemen laba dengan memindahkan *income* dari satu periode ke periode lain. *Income shifting* dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau biaya. Metode ini memiliki konsekuensi *cost of detection* dan terjadinya

reversal pada satu atau lebih periode di masa yang akan datang, seringkali pada periode berikutnya. Metode manajemen laba ini adalah metode yang paling umum dibahas.

b) *Classificatory Earnings Management* (Manajemen Laba melalui Klasifikasi)

Classificatory Earnings Management merupakan metode pengelolaan laba dengan cara mengklasifikasikan biaya (dan pendapatan) dalam bagian tertentu dari laporan laba rugi. Bentuk yang paling umum dari *classificatory earnings management* adalah memindahkan biaya-biaya ke *bottom line*, dalam arti melaporkan biaya-biaya ke dalam pos-pos *unusual* atau *nonrecurring*. Motivasi ini timbul karena sebagian besar investor dan analis cenderung mengabaikan pos biaya ini karena sifatnya yang *unusual* atau *nonrecurring*. Pergeseran biaya operasi ke dalam pos biaya ini, menyebabkan investor dan analis mengabaikan sebagian biaya operasi. McVay (2006) mendokumentasikan salah satu metode manajemen laba tersebut, yang disebut *classification shifting*. *Classification shifting* merupakan kesalahan klasifikasi yang dilakukan secara sengaja pada *core expenses* sebagai *special items* dalam laporan laba rugi dengan tujuan meningkatkan *core earnings* tanpa mengubah *net income*. *Core expenses* (biaya operasi inti) merupakan hasil penjumlahan dari harga pokok penjualan, biaya penjualan, serta beban umum dan administrasi perusahaan, sementara *core earnings* adalah laba yang dihitung atau diperoleh dari penjualan dikurangi dengan *core expense*

serta beban depresiasi dan amortisasi. Adapun *Government Accounting Standard Board* (GASB) pada pernyataan no. 34 paragraf 56 mendefinisikan *special items* sebagai transaksi signifikan atau kejadian-kejadian lain yang bersifat tidak normal (*unusual in nature*) atau tidak sering terjadi (*infrequent in occurrence*) tetapi bukan keduanya, di mana penentuan besarnya jumlah *item* ini berada di bawah kendali manajemen. *Special items* harus dilaporkan sebagai bagian dari *income from continuing operation* sebelum pos-pos luar biasa (*extraordinary items*). Istilah *special items* memang tidak familiar di Indonesia, bahkan seringkali banyak orang beranggapan bahwa *special items* sama dengan *extraordinary items*. Meskipun demikian PSAK 25 (1999) telah mengatur ketentuan ini dalam paragraf 12 sebagai berikut :

Suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar biasa (*extraordinary items*) jika memenuhi dua kriteria berikut :

i. Bersifat tidak normal

Kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan.

ii. Tidak sering terjadi

Kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan.

Penerapan kedua kriteria di atas harus selalu dihubungkan dengan sifat dan karakteristik dari kegiatan perusahaan serta faktor geografis

perusahaan. Bila hanya salah satu kriteria tersebut terpenuhi, maka transaksi atau kejadian tersebut dikelompokkan sebagai penghasilan atau beban lain-lain.

Berdasarkan kutipan tersebut, *special items* dapat dikategorikan sebagai komponen dari pos penghasilan dan beban lain-lain. Akan tetapi, tidak semua pos penghasilan atau beban lain-lain merupakan *special items*. Berikut beberapa contoh *item-item* yang digolongkan sebagai *special items* oleh Compustat Database (Elliot and Shaw, 1989) :

- i. *Bad debt expense/Provisions for doubtful accounts/Allowance for losses if non-recurring.*
- ii. *Write-downs or write-offs of receivables, intangible assets, etc.*
- iii. *Inventory writedowns when separate line item or called non-recurring.*
- iv. *Nonrecurring profit or loss on the sale of assets, investments, and securities.*
- v. *Relocation and moving expense.*
- vi. *Severance pay when a separate line item.*
- vii. *Write-downs or write-offs of receivables and intangibles.*
- viii. *Items specifically called "Restructuring/Reorganization".*

Special items merupakan jenis *item* yang tidak berulang yang paling umum dan penting. Akhir-akhir ini pelaporan *special items* telah mengalami peningkatan dalam hal jumlah dan frekuensinya. Sebagian besar *special items* yang dilaporkan adalah *special items* yang

mengurangi laba (*income decreasing special item*). Menganalisis *special items* merupakan hal penting dalam analisis akuntansi. Penggunaan estimasi-estimasi menimbulkan kesempatan untuk mengelola laba. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penurunan nilai dan penghapusan aktiva tetap serta sediaan, rugi penjualan aktiva tetap, serta biaya restrukturisasi merupakan *special charges* yang paling sering dilaporkan dan yang paling sering digunakan sebagai media untuk mengelola laba karena manajemen dapat menggunakan kebijakannya dalam menentukan jumlah dan waktu pengukuran *item* ini.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Manajemen Laba dengan *Classification Shifting*

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan usaha-usaha manajer untuk mempengaruhi persepsi investor tentang kinerja perusahaan melalui *special items*. McVay (2006) menguji klasifikasi pos dalam laporan laba rugi sebagai alat manajemen laba. McVay (2006) fokus pada penggunaan *special items*, yaitu menguji apakah manajer mengklasifikasikan *core expenses* sebagai *special items* untuk meningkatkan *core earnings*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajer secara oportunistik menggeser *core expenses* menjadi *special items*.

Fan *et al.* (2010) melanjutkan penelitian McVay (2006) yang fokus pada *special items*. Aspek pokok dari analisis yang dilakukan oleh Fan *et al.* (2010) adalah menggunakan data kuartalan bukan data tahunan. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa *classification shifting* lebih lazim dilakukan dalam kuartal keempat daripada dalam *interim quarters*.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan keyakinan bahwa penyajian dan klasifikasi biaya-biaya dalam laporan laba rugi merupakan sebuah mekanisme manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen. Manajer termotivasi untuk melaporkan *special items* karena *item-item* ini merupakan *one-time charges* yang kurang mendapat perhatian dari investor dan analis karena bersifat tidak berulang sehingga tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis alternatif yang pertama dinyatakan sebagai berikut :

H1: Perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan praktik *classification shifting*.

2.6.2. Classification Shifting dengan Kepemilikan Ultimat

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki pemegang saham yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan bagian dari manajemen itu sendiri. Hal tersebut berpotensi memunculkan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Masalah yang muncul biasanya berupa ekspropriasi yaitu proses penggunaan hak kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Meningkatnya ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, secara tidak langsung disebabkan oleh adanya *negative entrenchment effect*, yaitu tindakan yang dilakukan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi dengan berlindung pada hak kontrol yang mereka miliki.

Pernyataan di atas juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang diantaranya dilakukan oleh Haw dan Li (2011), Siregar (2008), serta Sanjaya (2010). Mereka memaparkan hasil penelitiannya bahwa tingkat *cash flow right leverage* di kawasan Asia Timur termasuk Indonesia memang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kontrol melalui berbagai mekanisme seperti kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan (sekarang sudah dilarang). Hak kontrol sebagai sumber *power* untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan inilah yang melandasi pemegang saham pengendali melakukan manajemen laba untuk menutupi ekspropriasi tersebut agar tidak terdeteksi oleh pihak eksternal. Berdasarkan uraian di atas dihipotesiskan dalam bentuk alternatif sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan ultimat berpengaruh positif terhadap praktik *classification shifting*.